

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen di Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, terdapat sejumlah kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1.1. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen

Proses Pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil temuan dan analisis menggunakan teori proses pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007:3-6) dengan tiga tahapan meliputi tahap penyadaran, pengkapasitasan dan tahap pendayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan sejak awal perencanaan pelaksanaan program desa wisata. Inisiatif pembangunan Desa Banjarpanepen sebagai desa wisata yang berasal dari masyarakat setempat dengan dukungan akademisi, mencerminkan kesadaran kolektif terhadap potensi desa mereka. Kesadaran ini terutama didasarkan pada pemahaman bahwa sumber daya alam, budaya, dan tradisi lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang mendukung

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan tahap penyadaran ini masih menghadapi beberapa kendala.

Pada aspek sosialisasi, sosialisasi mengenai program desa wisata di Desa Banjarpanepen hanya dilaksanakan di awal perencanaannya, yang menimbulkan sejumlah implikasi terhadap keberlanjutan program tersebut. Sosialisasi pada tahap awal memang berhasil memperkenalkan konsep desa wisata kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan awal dari beberapa pihak, namun kurangnya kelanjutan sosialisasi mengakibatkan pemahaman masyarakat tentang program ini menjadi terbatas dan tidak merata. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak peresmian Desa Banjarpanepen sebagai desa wisata, belum ada lagi sosialisasi yang diselenggarakan secara resmi, baik oleh Pemerintah Desa Banjarpanepen maupun oleh pengelola desa wisata. Adapun sosialisasi yang dilakukan cenderung hanya dilakukan secara mulut ke mulut sehingga kurang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen masih menunjukkan ketidakmerataan. Salah satu indikasinya adalah keterlibatan masyarakat yang cenderung didominasi oleh mereka yang tinggal di sekitar area wisata. keinginan masyarakat untuk terlibat juga mengalami penurunan sejak adanya pandemi Covid-19. Dalam hal ini, meskipun masyarakat Desa Banjarpanepen telah memiliki kesadaran akan potensi yang dimiliki, perlu dibarengi dengan sosialisasi yang memadai sebagai sarana untuk mendorong minat masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan.

B. Tahap Pengkapasitasan

Tahap peningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen telah dilaksanakan dengan keterlibatan berbagai pihak, namun perlu adanya pembenahan lebih lanjut. Untuk peningkatan kapasitas manusia, telah dilakukan berbagai pelatihan dan pendidikan untuk mendukung keberjalanan desa wisata. Minat masyarakat juga tinggi untuk terlibat dalam pelatihan yang diselenggarakan. Adapun dalam peningkatan kapasitas organisasi, masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena meskipun telah dilaksanakan restrukturisasi organisasi dan pelatihan, organisasi pengelola masih menghadapi kendala terkait belum cukupnya keahlian dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, masih juga terdapat organisasi pemberdayaan masyarakat yang belum mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga organisasi belum berjalan dengan optimal.

Adapun dalam pengkapasitasan nilai, belum terdapat aturan yang dibentuk dan disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen. Organisasi pemberdayaan masyarakat berjalan berdasarkan mekanisme internal masing-masing tanpa adanya sinergitas bersama. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam membangun landasan normatif yang kuat, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk menjalankan perannya secara sinergis. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan terkait rendahnya rasa memiliki diantara pengelola dan masyarakat sehingga mereka cenderung mengandalkan satu sama lain dan mengakibatkan pengelolaan Desa Wisata Banjarpanepen cenderung stagnan.

C. Tahap Pendayaan

Tahap pendayaan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pada aspek keberjalanan program desa wisata, terdapat sejumlah kendala yang cukup signifikan. Pelimpahan wewenang pengelolaan desa wisata kepada organisasi pemberdayaan masyarakat yang belum disertai dengan kesiapan organisasi tersebut mengakibatkan pengelolaan desa wisata berjalan tanpa arah yang jelas, dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, pandemi Covid-19 membawa perubahan besar dalam pelaksanaan kegiatan wisata di Desa Banjarpanepen. Hingga saat ini, pengembangan desa wisata belum sepenuhnya pulih, dan fokus utamanya pun bergeser dari orientasi profit menjadi upaya untuk membangun kembali fondasi pariwisata yang sempat runtuh.

Adapun pada aspek kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha, telah terdapat inisiatif-inisiatif yang muncul dari penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan keberadaan desa wisata. Namun, meskipun inisiatif-inisiatif ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, tingkat keberhasilannya masih sangat bervariasi dan belum menunjukkan adanya keberlanjutan. Hal ini terlihat dari program-program pelatihan yang sudah dilaksanakan, di mana keterampilan yang diajarkan kepada masyarakat belum diterapkan secara maksimal karena minimnya pendampingan dan tindak lanjut yang memadai.

Pada aspek bantuan yang diberikan, muncul kendala lain yakni adanya keterbatasan dukungan finansial yang signifikan untuk menunjang keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata. Hingga saat ini, pengembangan desa wisata, keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan organisasi pengelola Desa Wisata Banjarpanepen masih menghadapi kendala terkait keterbatasan anggaran dan modal. Masalah ini memengaruhi hampir semua aspek, mulai dari pelaksanaan kegiatan wisata, perbaikan infrastruktur pendukung, hingga pelatihan dan pendampingan masyarakat yang seharusnya berlangsung secara berkesinambungan. Ketiadaan dana yang memadai mengakibatkan banyak program berjalan tidak optimal, bahkan beberapa inisiatif terhenti di tengah jalan karena kekurangan dukungan finansial.

4.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Banjarpanepen

A. Faktor Internal

Terdapat tiga faktor internal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen, meliputi keinginan dan kesadaran masyarakat, potensi dan kemampuan masyarakat serta modal sosial. Ketiga faktor ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam program pemberdayaan dan pengembangan desa wisata.

Keinginan dan kesadaran masyarakat menjadi landasan awal dalam pemberdayaan. Ketika masyarakat memiliki kemauan untuk berpartisipasi, hal ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Di Desa Banjarpanepen, meskipun ada kelompok masyarakat yang telah menunjukkan kesadaran dan minat tinggi untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata dan program pemberdayaan yang diselenggarakan, partisipasi ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat.

Adapun keinginan dan kesadaran masyarakat harus dibarengi dengan potensi dan kemampuan yang memadai untuk terlibat dalam pemberdayaan. Di Desa Banjarpanepen, potensi ini sudah mulai dimanfaatkan, seperti melalui pengembangan produk lokal atau usaha kecil di sekitar area wisata. Namun, kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ini masih perlu ditingkatkan. Pelatihan yang sudah diberikan sering kali belum optimal karena keterbatasan akses ke pelatihan lanjutan atau pendampingan intensif, sehingga penerapan keterampilan yang diperoleh belum maksimal. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam pengelolaan wisata juga masih sangat terbatas.

Aspek modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Desa Banjarpanepen merupakan kekuatan utama yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan. Modal sosial ini tercermin dalam adanya rasa kebersamaan, kepercayaan, dan jaringan hubungan yang kuat di antara masyarakat. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan event-event tertentu di desa Banjarpanepen yang menjadikan modal sosial sebagai landasan kerja sama.

B. Faktor Eksternal

Terdapat tiga faktor eksternal yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen, meliputi kebijakan pemerintah, peran fasilitator dan pemberdaya, serta ketersediaan akses. Dalam aspek kebijakan pemerintah, telah terdapat berbagai dukungan kebijakan. Kebijakan ini mencakup upaya peningkatan kapasitas masyarakat, pengelolaan sumber daya, dan promosi pariwisata lokal. Namun dalam hal ini, Desa Banjarpanepen belum memiliki regulasi formal yang mengatur pengelolaan desa wisata secara terintegrasi, termasuk pembagian peran antar organisasi masyarakat, tata kelola keuangan, serta mekanisme pelibatan masyarakat.

Pada aspek fasilitator dan pemberdaya, pemerintah setempat, dinas-dinas terkait dan akademisi, telah banyak berkontribusi melalui pelatihan-pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Selain itu, baik dari sektor pemerintah maupun akademisi, telah mendukung dengan memberikan akses terhadap pengetahuan, pendampingan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Namun, banyak skema pemberdayaan yang dilaksanakan oleh fasilitator dan pemberdaya di Desa Wisata Banjarpanepen sering kali tidak dilengkapi dengan sistem monitoring yang memadai dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Aspek ketersediaan akses baik terhadap sumber daya finansial, informasi, maupun teknologi menjadi tantangan signifikan. Akses terhadap pendanaan, khususnya dari sektor swasta melalui skema CSR, belum teroptimalkan dengan baik di Desa Banjarpanepen. Selain itu, akses terhadap pelatihan lanjutan dan

mentoring intensif juga masih terbatas, sehingga keterampilan yang diperoleh masyarakat sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Keterbatasan ini memperlambat proses pengembangan desa wisata dan membatasi masyarakat dalam menjangkau peluang ekonomi yang lebih luas.

4.2. Saran

1. Pemerintah bersama dengan organisasi pengelola dan masyarakat Desa Banjarpanepen diharapkan dapat menyusun panduan atau roadmap pengembangan desa wisata yang terintegrasi, berorientasi jangka panjang, dan berbasis kebutuhan lokal yang mencerminkan visi, misi, serta langkah-langkah konkret yang akan ditempuh dalam pengembangan desa wisata secara berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Banjarpanepen.
2. Pemerintah dan organisasi pengelola diharapkan melakukan pendekatan yang lebih strategis dalam aspek sosialisasi. Sosialisasi seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan satu kali pada awal program, tetapi dijadikan proses berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan program, memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, serta merasa dilibatkan dalam setiap keputusan yang diambil.
3. Fasilitator dan pemberdaya diharapkan dapat merancang program peningkatan kapasitas yang lebih strategis dan berkesinambungan. Program peningkatan kapasitas yang strategis harus dimulai dengan pemetaan kebutuhan dan potensi masyarakat secara komprehensif. Pertama, perlu

adanya penyusunan rencana pembinaan jangka panjang yang didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat dan organisasi pengelola wisata. Rencana ini harus mencakup target pencapaian yang jelas, metode pelatihan yang efektif, serta mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program. Selain itu, fasilitator dan pemberdaya diharapkan dapat memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat dan organisasi pasca-pelatihan untuk memastikan keberlanjutan program.

4. Organisasi pengelola diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan intensif tentang manajemen wisata, pelayanan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya. Kedua, membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik dengan mengadakan pertemuan rutin yang tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengevaluasi progres program dan mendiskusikan solusi atas kendala yang dihadapi. Ketiga, memperkuat dukungan eksternal dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional yang dapat membantu pengembangan organisasi, baik dari segi pelatihan maupun sumber daya.
5. Pemerintah dan Organisasi Pengelola Desa Wisata Banjarpanepen diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan agen perjalanan wisata atau media promosi yang tersedia untuk meningkatkan branding dan promosi sebagai strategi utama membuka peluang kolaborasi dengan pihak eksternal untuk membantu meningkatkan akses sumber daya.